



Pemkot Negosiasi Tambahan Kamar Isolasi

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta tengah melakukan negosiasi ke beberapa rumah sakit rujukan. Negosiasi tersebut berkaitan dengan kamar isolasi untuk penanganan Covid-19.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwa-

di, mengatakan, saat ini ada 45 kamar isolasi dari tujuh rumah sakit rujukan di Kota Yogyakarta. Hingga saat ini, kamar isolasi masih cukup untuk menampung pasien positif maupun pasien dalam pengawasan (PDP).

"Saat ini masih cukup. Ada 45 kamar isolasi di tujuh rumah sakit rujukan,"

Minggu (10/5).

Ia mengungkapkan negosiasi tersebut perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan kamar isolasi bagi pasien Covid-19. Meski saat ini masih mencukupi, namun Heroe me-

● ke halaman 15

Pemkot Negosiasi Tambahan

● Sambungan Hal 9

rasa perlu ada penambahan ruang isolasi.

Menurut dia, saat ini Kota Yogyakarta perlu mewaspada adanya lonjakan kasus dari klaster-klaster tertentu yang berkembang di kabupaten lain. Selain mewaspada klaster GPIB, Kota Yogyakarta juga perlu mewaspada klaster Indogrosir.

"Kami sedang melakukan negosiasi dengan rumah sakit untuk membuka lagi (menambah) kamar isolasi. Sebisanya saja, kalau memang tidak bisa ya sudah. Untuk saat ini yang paling

memungkinkan ya Balai Diklat Kemensos (untuk tambahan isolasi)," ungkapnya.

Menurut dia, saat ini pihaknya sudah perlu menyediakan lebih banyak ruang isolasi. Hal tersebut untukantisipasi, jika terjadi lonjakan kasus dari klaster-klaster tersebut. Ia menilai letak geografis Kota Yogyakarta yang berbatasan dengan Sleman dan Bantul memberikan pengaruh pada penyebaran kasus di Kota Yogyakarta.

"Memang secara geografis Kota Yogyakarta ada di tengah-tengah. Pasti akan berdampak juga pada kasus di Kota Yogyakarta, walaupun cuma sedikit. Makanya kami perlu antisipasi. Apala-

gi saat ini kami sedang upayakan *tracing*," ujarnya.

"Kalau hasil *tracing* ada yang reaktif (*rapid test*) atau positif (*swab*), berarti kan harus ada kamar isolasi lebih banyak," tutupnya.

Pencegahan

Wakil Ketua Gugus Tugas penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yuswantana menegaskan, Pemda mengimbau supaya pemerintah Kota/Kabupaten harus tegas, memberikan instruksi terkait pengetatan perilaku di supermarket atau swalayan.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bukan sebuah pendekatan otoriter namun pendekatan lebih kepada perilaku pencegahan. "Buat regulasi dan sediakan alat-alat penunjang pencegah-

an. Ini bukan pendekatan otoriter tapi lebih kepada perilaku," sambung Biwara, tempo hari.

Saat ini beberapa klaster penyebaran lokal sudah bermunculan di DIY, mulai dari Jamaah Tabligh Sleman dan Gunung Kidul, Indogrosir dan jamaah gereja GPIB sudah muncul. Untuk langkah antisipasi jika ada lonjakan kasus lebih tinggi, Pemda DIY belum menentukan pa-

yang hukum yang sesuai. "Langkah kebijakan berupa penindakan tegas bisa kami lakukan. Tapi kan harus dilakukan dengan pendekatan juga. Ya ini yang sedang kami lakukan. Patroli di kerumunan dan penjagaan di perbatasan," pungkaskannya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005